

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Gerakan Sosial

Gerakan sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan dan tujuan bersama untuk melakukan suatu perlawanan atau menentang suatu kebijakan seseorang atau kelompok yang mereka anggap sebagai musuh politik. Gerakan sosial juga merupakan sebagai bentuk suatu aktivitas yang berpusat pada beberapa isu sosial maupun politik yang didalamnya terdapat kelompok sosial, melakukan tindakan, dan dengan tindakan tersebut berharap adanya suatu perubahan sosial. Gerakan sosial itu muncul ketika adanya ketidakpuasan terhadap suatu kebijakan. Maka masyarakat akan terus berkembang ketika ketidakpuasan ini meluas dan pada waktu yang bersamaan, namun tidak ada lagi lembaga-lembaga yang mampu berperan secara aktif dan mampu responnya terhadap permasalahan ini.

Menurut Locher dalam Sukamana (2016 : 4), gerakan sosial adalah sekelompok orang yang mengatur dan mengorganisir dalam upaya untuk menolak beberapa jenis perubahan sosial yang dirasa tidak sesuai dengan kehendaknya. Gerakan sosial juga merupakan Individu-individu dengan sedikit atau banyak kekuatan politik yang dimilikinya lalu mereka bersatu untuk mendapatkan dan memperjuangkan beberapa hal yaitu perubahan sosial.

Menurut Klandermans dalam Sukmana (2016 : 4-5) mengutip pendapat Tarrow yang menyatakan bahwa gerakan sosial suatu penentangan atau penolakan secara kolektif oleh orang-orang yang mempunyai solidaritas dan tujuan yang sama dalam proses interaksi yang terus menerus dengan pihak elite, pihak lawan, dan pihak yang berwenang. Pendapat Tarrow ini dapat didefinisikan bahwa:

- a. Suatu gerakan penentangan dan penolakan terhadap elite, penguasa terhadap aturan kelompok dan budaya lainnya;
- b. Suatu gerakan dilakukan dengan tuntutan yang sama terhadap pihak lawan, pihak berwenang, dan elite;
- c. Suatu gerakan yang didasari dengan solidaritas dan identitas kolektif;
- d. Untuk meneruskan arah tujuan tindakan kolektif, maka bentuk pertarungan diubah ke dalam suatu gerakan sosial.

Adapun Syarat-syarat terjadinya suatu gerakan sosial dilihat dari penelitian Freeman yang menganalisis empat bentuk gerakan sosial yang terjadi antara tahun 1960-1970 (Sukmana, 2016:6) yakni:

- a. Adanya jaringan komunikasi;
- b. Dapat memberikan informasi dan menentukan pilihan penyebaran ide-ide gerakan;
- c. Adanya krisis sebagai penyebab keterlibatan;
- d. Adanya upaya untuk mengorganisasi kelompok-kelompok yang tertarik untuk bergabung ke dalam suatu gerakan.

Dalam kaitannya dengan ilmu sosial istilah tersebut selalu diartikan berbeda, oleh karena itu definisi mengenai gerakan sosial tidak hanya satu. Karena realitas sosial yang selalu berubah-ubah, keanekaragaman latar belakang sosial, politik, budaya, ekonomi masyarakat yang akan disampaikan, dipahami serta diubah. Kemudian adanya ikatan hubungan timbal balik antara realitas sosial dengan teori-teori sosial yang akan menjadikan beberapa faktor-faktor yang sangat mempengaruhi tentang perbedaan makna diantara para ahli salah satunya adalah istilah tentang gerakan sosial.

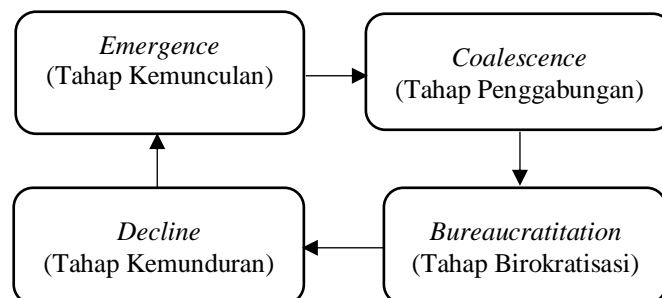
Menurut Macionis dalam Sukmana (2016 : 26-28) dari hasil kajian tersebut mendapat kesimpulan dengan beberapa penelitian lainnya, namun dalam proses gerakan sosial ini terdapat beberapa tahapan, diantaranya adalah;

- a. *Emergence* (tahap kemunculan), yaitu gerakan sosial muncul ketika adanya suatu persepsi bahwa segalanya sedang tidak baik-baik.
- b. *Coalescence* (tahap penggabungan), setelah tahap kemunculan, suatu gerakan sosial harus mampu mengembangkan dirinya sendiri dengan membuat strategi untuk menuju pada massa atau orang banyak dan seorang pemimpin harus menentukan kebijakan dan memutuskan taktik yang akan digunakan, membangun moral, serta melakukan rekrutmen keanggotaan baru.

- c. *Bureaucratization* (tahap birokratisasi), yaitu gerakan sosial memiliki sifat-sifat birokrasi agar menjadi sebuah kekuatan politik. Dengan demikian, gerakan akan menjadi mapan dan ketergantungan terhadap kharisma pemimpin akan sedikit menurun karena akan digantikan oleh staf lainnya yang mumpuni. Gerakan sosial akan mudah hilang apabila suatu gerakan sosial tidak menjadi mapan.
- d. *Decline* (tahap penurunan/kemunduran), pada akhirnya gerakan sosial akan kehilangan pengaruhnya dengan beberapa alasan yaitu karena gerakan sosial telah berhasil mencapai tujuannya, karena adanya kelemahan atau pertentangan dalam organisasi, karena adanya kooptasi atas para pemimpin gerakan, karena adanya tekanan terutama dari pihak eksternal, dan karena gerakan tersebut terbentuk dalam pengarusutamaan atau beberapa gerakan dapat diterima ke dalam bagian dari suatu sistem sehingga tidak ada tantangan atau status *quo*.

Gambar 2.1

Tahapan Gerakan Sosial



Sumber: Oman Sukmana, 2016 : 26

Dari masa ke masa gerakan sosial terus mengalami perkembangan, oleh karena itu gerakan sosial dapat dibedakan menjadi gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru. Gerakan sosial lama atau gerakan sosial klasik (*old social movement*) merupakan gerakan untuk memperjuangkan kelompok-kelompok sosial tertentu seperti kelas pekerja, buruh, petani dan lain-lain, gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau otonomi politik kelas pekerja. Seperti disampaikan oleh Karl Marx misalnya masyarakat perjuangan kelas dimana terdapat pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kelas pemilik alat produksi (*borjuis*) dan kelas buruh (*proletar*).

Gerakan sosial lama memiliki beberapa ciri-ciri diantaranya mempunyai struktur organisasi, memiliki pemikiran dasar sebagai landasan perjuangan atau ideologi, dan harus mempunyai identitas yang jelas agar dikenal oleh masyarakat. Sebagai contoh organisasinya adalah kelompok mahasiswa, kelompok ormas atau masyarakat itu sendiri, kelompok agama, dan kelompok buruh. Dalam aksinya gerakan sosial lama dilatarbelakangi oleh kekecewaan dan kecemasan terhadap suatu kebijakan dan pemerintahan (Prasetya, 2019).

Sedangkan gerakan sosial baru muncul dan berkembang sekitar abad ke 20 dimana gerakan ini merupakan gerakan yang dominan dan bersifat plural. Menurut Melucci, dkk dalam Sukamana (2016 : 125) gerakan sosial baru atau *new social movement* bergerak dari anti rasialisme, anti nuclearism, pelucutan senjata, regionalisme dan etnisitas, kebebasan sipil dan sebagainya hingga ke isu-isu kebebasan personal dan perdamaian. Gerakan sosial baru bersifat

dalam artian adanya kebebasan pada gerakan itu sendiri seperti tidak memiliki organisasi, tidak debirokratisasi, tetapi mempunyai tujuan yang sama. gerakan ini lebih fokus terhadap upaya agar pemerintah lebih memperhatikan kembali diluar kepentingan materiil.

Untuk memahami bagaimana gerakan sosial muncul dan berkembang dapat dilihat dari beberapa hal seperti :

a. Peluang Politik (*Political Opportunity*)

Untuk menguji macam-macam bentuk ketegangan politik seperti demokratisasi, revolusi, nasionalisme dan gerakan sosial, pada tahun 1960-an ilmuan Barat menggunakan beberapa mekanisme. Salah satunya adalah *Political Opportunity Structure* (POS) atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan Struktur Kesempatan Politik. McAdam menjelaskan dalam (Situmorang, 2007:3) bahwa gerakan sosial akan terjadi ketika adanya perubahan dalam struktur, sehingga akan dilihat sebagai suatu kesempatan. Dengan kata lain jika suatu negara dalam struktur atau kebijakannya sedang mengalami perubahan dan perubahan tersebut tidak dikehendaki oleh masyarakat maka itu akan menjadikan kesempatan politik (*political opportunity*) dan melahirkan suatu gerakan sosial.

Berdasarkan pemikiran Eisinger dalam (Situmorang, 2007:4) gerakan sosial akan muncul dengan menggunakan mekanisme POS (*Political Opportunity Structure*) ketika adanya

4 faktor, diantaranya adalah terbukanya akses kepada lembaga-lembaga politik. Kedua, terjadi kekacauan pada keseimbangan politik sedangkan keseimbangan politik yang baru belum terbentuk. Ketiga, konflik di antara elite politik dan hal ini dijadikan kesempatan oleh para pelaku perubahan. Keempat, ketika elite politik yang berada dalam sistem mengajak berkoalisi kepada para pelaku perubahan untuk terlibat membuat kebijakan yang baru. Faktor-faktor ini hanyalah cerminan dari kasus-kasus tertentu. Variabel-variabel tersebut bisa digunakan dan dijadikan rujukan pada kasus gerakan sosial, tetapi tidak seharusnya semua variabel tersebut digunakan untuk menguji suatu gerakan sosial, tergantung pada kasus yang sedang terjadi saat itu (Situmorang, 2007:4).

b. Struktur Mobilisasi (*Mobilitation Structure*)

Konsep struktur mobilisasi sebagai cara-cara yang disepakati untuk terlibat dalam tindakan kolektif yang meliputi repertoar taktik-taktik tertentu, bentuk organisasi gerakan sosial khusus, dan repertoar modular (rancangan) gerakan sosial (McCarthy dalam (Sukmana, 2016). Dengan kata lain struktur mobilisasi adalah sebagai susunan yaitu cara, langkah, maupun strategi tindakan kolektif yang berperan untuk alat mobilisasi suatu gerakan sosial.

Menurut McCarthy dalam Sukmana (2016 : 213) dimensi yang bisa dijadikan alat struktur mobilisasi diantaranya adalah dimensi tidak resmi, seperti : jaringan aktivis, kelompok-kelompok kesamaan, komunitas memori. Serta dimensi resmi, seperti organisasi gerakan sosial, komite-komite protes, dan lembaga-lembaga gerakan. Oleh karena itu peran organisasi sangat penting bagi keberlangsungan gerakan sosial, hal ini bisa disebut sebagai mobilisasi sumberdaya (McCarthy dan Zald dalam Badawi, 2015). Sumber daya ini diantaranya adalah : pengetahuan, uang, media, tenaga kerja, kesetiakawanan, legitimasi dan dukungan internal dan eksternal dari penguasa (Maarif dalam Suwarno, 2016).

Penjelasan lain oleh David S. Mayer, Nancy Whittier, dan Belinda Robnett dalam buku *Social Movements: Identity, Culture, and the State*, (Naples, 2002 : 6) :

“We see public policy reform not only as the result of movement activities but also as the cause of changes in movement strategy, claims, and tactics. In theoretical parlance, changes in policy influence political opportunities, and activists respond accordingly, trying to mobilize, or to affect new policy changes in these new circumstances. (Kita melihat reformasi kebijakan publik tidak hanya sebagai hasil dari aktivitas suatu gerakan, tetapi sebagai penyebab perubahan strategi gerakan, klaim dan taktik secara teoritis, perubahan dalam kebijakan mempengaruhi peluang politik, dan aktivis menanggapi dengan sesuai, mencoba untuk memobilisasi, atau untuk mempengaruhi perubahan kebijakan baru dalam situasi yang baru)”.

Oleh karena itu perubahan kebijakan publik tidak hanya bergantung pada aktivitas suatu gerakan, akan tetapi perubahan suatu kebijakan publik bisa dilihat dari strategi, klaim, dan taktik gerakan yang baik dan terstruktur dengan rapi. Dan perubahan suatu kebijakan akan mempengaruhi kesempatan politik jika aktivis yang terlibat mampu memobilisasi massa dengan baik untuk mempengaruhi kebijakan yang baru dalam permasalahan dan situasi yang sedang dihadapi.

c. Proses Framing

Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu gerakan dapat dilihat dari sumber daya yang kuat seperti kepemimpinan, organisasi, dan kuatnya dana, juga kesempatan politik seperti adanya momentum politik yang tepat. Selain itu bagaimana para aktor perubahan tersebut bisa mengemas isu dengan baik, hal ini kita kenal dengan nama proses *framing*. Snow & Bamford dalam Situmorang (2007:10) mengatakan bahwa suksesnya gerakan sosial terletak pada sampai sejauh mana mereka memenangkan pertempuran atas arti. Hal ini sejalan dengan bagaimana para aktor perubahan bisa mempengaruhi makna dalam kebijaksanaan publik. Oleh sebab itu para aktor perubahan harus mampu menjalankan tugas penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara membuat *framing* ketidakadilan dan problematika sosial yang sedang diperjuangkan.

Benford & Snow (Sumarwan, 2018) ada tiga komponen penting sebagai peran utama *framing*, diantaranya adalah :

- 1) *Diagnostic framing*, berperan untuk mengidentifikasi masalah dan sebab akibat dari masalah tersebut. Dengan cara ini bisa diketahui siapa yang menjadi korban atas ketidakadilan dan mengetahui pelaku ketidakadilan tersebut.
- 2) *Prognostic framing*, berperan untuk menawarkan solusi mengenai masalah yang sedang terjadi dan membuat strategi yang harus diperjuangkan sesuai dengan identifikasi sumber masalah.
- 3) *Motivational framing* bertujuan untuk menarik simpati massa agar tergerak melakukan aksi yaitu mempersiapkan kata-kata atau jargon yang cocok supaya memotivasi orang untuk terlibat dalam gerakan.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui posisi serta ketajaman dalam penelitian, penelitian terdahulu sangat diperlukan untuk menjadi bahan referensi dan acuan untuk memperoleh penulisan yang baik. Adapun penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai referensi diantaranya adalah, Erna Tresnawati (2019) dengan judul Gerakan Sosial Islam (Gerakan GP Ansor Kota Tasikmalaya dalam Menolak *Full Day School*). Gerakan sosial yang dilakukan oleh Organisasi Islam GP Ansor bertujuan untuk menolak *full day school*, dilatar belakangi oleh banyaknya tenaga

kerja Nahdlatul Ulama (NU) pada Lembaga pendidikan. Dianalisis melalui teori *framing* dengan cara gerakan dibingkai dengan ketidak setujuan sekolah formal sebagai cara meningkatkan pendidikan karakter bagi anak, sehingga sekolah menjadi solusi yang tepat bagi penerapan pendidikan karakter bagi anak.

Selanjutnya penelitian dari Rafi Akhsanul Kholikin (2020) yang berjudul Gerakan Sosial Buruh Tani Di Perbatasan (Studi Kasus Gerakan Buruh Tani di Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis). Pola dan strategi gerakan sosial buruh tani di Kecamatan Lakbok yang diinisiasi oleh Forum Pemuda Lakbok Jaya (FPLJ) serta Aliansi Karang Taruna Lakbok (AKTL) dalam menuntut *equality development* bagi buruh tani yang didalamnya berisi tuntutan perbaikan jalan inspeksi serta revitalisasi saluran irigasi di Kecamatan Lakbok. Hal ini merupakan bentuk meningkatkan produktivitas pertanian menggunakan beberapa tahapan, seperti : observasi, langkah non-legitimasi dan litigasi, Pendidikan politik, diskusi, dan terakhir aksi demonstrasi serta diplomasi.

Dan penelitian Rina Siti Nuraisyah (2018) yang berjudul Gerakan Pembaruan Agraria Serikat Petani Pasundan (Studi Kasus Organisasi Tani Lokal Ciceeng, Desa Sindangasih Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan hasil penelitian, aspek operasional dan teknis reforma agraria yang telah dilakukan Serikat Petani Pasundan (SPP) pada kasus Cieceng yaitu : (1) adanya organisasi untuk implementasi agraria, (2) adanya organisasi rakyat, (3) individu vs keluarga sebagai penerima tanah dan layanan terkait karena tanah telah digunakan masyarakat dan diberi jatah satu hektar untuk setiap kepala keluarga, (4) pendidikan dan pelatihan reforma agraria yang diwujudkan dalam bentuk sekolah dengan

kurikulum yang membahas reforma agraria, (5) kegiatan tanah untuk kegiatan non pertanian yang telah diwujudkan dengan tanah yang dijadikan fasilitas umum seperti sekolah, masjid dan yang lainnya.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Erna Tresnawati (2020) Gerakan Sosial (GP Ansor Kota Tasikmalaya dalam Menolak <i>Full Day School</i>)	Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Gerakan sosial yang dilakukan oleh Organisasi Islam GP Ansor bertujuan untuk menolak <i>full day school</i> , dilatarbelakangi oleh banyaknya tenaga kerja Nahdlatul Ulama (NU) pada Lembaga pendidikan. Dianalisis melalui teori <i>framing</i> dengan cara Gerakan dibingkai dengan ketidaksetujuan sekolah formal sebagai cara meningkatkan pendidikan karakter bagi anak, sehingga sekolah menjadi solusi yang tepat bagi penerapan Pendidikan karakter bagi anak.	Objek penelitian, fokus penelitian, dan lokasi penelitian berbeda.
2.	Rafi Akhsanul Kholikin (2020)	Metode penelitian	Bahwa pola dan strategi buruh tani yang terhimpun dalam	Objek penelitian, fokus penelitian,

	Gerakan Sosial Buruh Tani di Perbatasan (Studi Kasus Gerakan Buruh Tani di Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis)	kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus.	Forum Pemuda Lakbok Jaya (FPLJ) dan Aliansi Karang Taruna Lakbok (AKTL) dalam proses gerakan sosial buruh tani di Kecamatan Lakbok menuntut tercapainya <i>equality development</i> yang terinci dalam perbaikan jalan inspeksi dan revitalisasi saluran irigasi yang tidak optimal dikarenakan tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan jalan maupun saluran irigasi. Adapun tahapan pola dan strategi gerakan sosial buruh tani meliputi; observasi, langkah non-litigasi dan litigasi, diskusi, pendidikan politik dalam mimbar bebas, aksi demonstrasi dan diplomasi.	dan lokasi penelitian berbeda.
3.	Rina Siti Nuraisyah (2018) Gerakan Pembaruan Agraria Serikat Petani Pasundan (Studi Kasus	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan	Aspek operasional dan teknis reforma agraria yang telah dilakukan Serikat Petani Pasundan (SPP) pada kasus Cieceng ialah: (1) adanya organisasi untuk implementasi	Objek penelitian, fokus penelitian, dan lokasi penelitian berbeda.

	Organisasi Tani Lokal Ciceeng, Desa Sindangasih Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya.	studi kasus.	agraria, (2) adanya organisasi rakyat, (3) individu vs. keluarga sebagai penerima tanah dan layanan terkait karena tanah telah digunakan masyarakat dan diberi jatah satu hektar untuk setiap kepala keluarga, (4) pendidikan dan pelatihan reforma agraria yang diwujudkan dalam bentuk sekolah dengan kurikulum yang membahas reforma agraria, (5) kegiatan tanah untuk kegiatan non pertanian yang telah diwujudkan dengan tanah yang dijadikan fasilitas umum seperti sekolah, masjid dan yang lainnya.
--	---	-----------------	---

C. Kerangka Pemikiran

Beberapa permasalahan dan keluhan terkait masalah pertanian terutama mengenai menurunnya regenerasi petani yang menjadikan posisi petani semakin terpuruk. Tetapi dengan kemunculan kaum intelektual di tengah-tengah permasalahan petani seperti membawa angin segar terhadap kehidupan petani khususnya petani miskin yang ada di Kota Tasikmalaya. Oleh karena itu mereka merasa percaya diri kembali setelah adanya kesadaran bahwa petani merupakan masyarakat Indonesia yang memiliki hak politik dan ekonomi yang setara dan wajib

diperlakukan dengan seadil-adilnya oleh negara. Akhirnya dengan pemikiran dan tujuan yang sama terbentuklah Aliansi Peduli Regenerasi Petani Kota Tasikmalaya yang dapat menjadi media untuk mewedahi semua keluhan juga aspirasi dari masyarakat petani Kota Tasikmalaya.

Berbagai kondisi permasalahan petani di Kota Tasikmalaya yang dijadikan tuntutan oleh Aliansi Peduli Regenerasi Petani Kota Tasikmalaya, diantaranya adalah;

1. Tentang stabilnya harga pasar
2. Pemaksimalan hasil produk pertanian lokal Tasikmalaya
3. Bulog tidak hanya subsidi PAJALE (Padi, Jagung, Kedelai)
4. Stop program sapras tak tepat guna
5. Penanganan tengkulak dan pemaksimalan pasar tradisional
6. Stop alih fungsi lahan
7. Tolak UU pertanahan

Dengan adanya tuntutan-tuntutan ini para petani mengharapkan adanya regenerasi yang akan mengubah nasib petani menjadi lebih baik. Serta agar pemerintah lebih bijak dan mengimbangi untuk memperhatikan dan memperjuangkan kesejahteraan petani. Sehingga membuat citra petani di mata masyarakat tidak di pandang sebelah mata yang bekerja di sawah, berpakaian kotor tanpa alas kaki dan bekerja di bawah panasnya terik matahari. Oleh karena itu regenerasi petani butuh campur tangan dari pemerintah dan kolaborasi bersama kaum milenial sehingga pertanian di Indonesia semakin maju serta para petani tidak dipandang lagi sebelah mata dan mendapatkan kesejahteraan hidupnya.

Studi gerakan sosial merupakan teori yang membuktikan adanya suatu gerakan berupa aksi dari Aliansi Peduli Regenerasi Petani Dalam Menuntut Masalah Pertanian di Kota Tasikmalaya dilihat dari beberapa hal yaitu peluang politik, struktur mobilisasi, dan proses *framing*. Aliansi ini merupakan gabungan dari beberapa organisasi yang memiliki tujuan yang sama untuk mengingatkan kepada pemerintah supaya tidak melupakan hak- hak dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu mereka melakukan aksi di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Lalu ada teori peluang politik (*political opportunity*), dimana teori tersebut untuk melihat apakah pada saat gerakan sosial berlangsung adanya kesempatan politik atau tidak. Setelah itu teori struktur mobilisasi berperan untuk mengetahui susunan yaitu cara, langkah, maupun strategi tindakan kolektif yang berperan untuk sarana mobilisasi suatu gerakan sosial. Dan proses *framing* berperan untuk mengetahui bagaimana para aktor perubahan tersebut bisa mengemas isu dengan baik.

Selain itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk menemukan makna, menyelidiki proses, serta memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam serta utuh dari individu, kelompok, atau situasi tertentu yang berkaitan dengan gerakan sosial Peduli Regenerasi Petani Kota Tasikmalaya. Hal yang diharapkan pada penelitian ini adalah mengetahui bagaimana gerakan sosial yang dilakukan oleh Aliansi Peduli Regenerasi Petani Kota Tasikmalaya. Kemudian apakah akan terpecah kembali pada organisasinya masing-masing dilihat dari teori gerakan sosial.

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran

